

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

Oleh

Kadek Dwi Parmita^{1*}, Putu Ayu Anggya Agustina²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka

Email: ¹044404744@ecampus.ut.ac.id, ²anggyagustina@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

This research is necessary to determine the extent of the effect of SLA on the financial recording of the Social Service of Buleleng Regency. A data accumulation strategy was employed quantitatively using a questionnaire. The data analysis method used is simple linear regression statistical analysis. The partial test analysis (T) produces a sig value (0.000) < alpha (0.005), indicating that SLA can influence the financial recording of the Social Service of Buleleng Regency. Furthermore, the coefficient test results show that 73.4% of the impact exists. Therefore, in order to evaluate the gaps and implement changes as soon as possible, the local government, and specifically the Social Service, must periodically monitor and audit the accounting information system in use. The agency should not only oversee staff performance but also monitor the information system being used..

Kata Kunci: *Accounting System; Financial Reports, Government Accounting*

PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat akan akuntabilitas publik yang lebih terbuka dan bertanggung jawab merupakan salah satu indikasi bahwa Indonesia adalah negara yang berkembang. Akuntabilitas publik sangat dihargai oleh pemerintah, seperti terlihat dari perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia. Kemampuan untuk mengelola uang secara jujur dan bertanggung jawab adalah hal yang penting bagi pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah adalah bagian dari sektor publik, mereka diwajibkan untuk menerbitkan laporan keuangan yang bertanggung jawab dan transparan (Indrayani & Widiastuti, 2020). Di banyak negara, termasuk Indonesia, akuntansi sektor publik berkembang dengan sangat pesat. Ini terbit dikarenakan laporan keuangannya dilaporkan dengan akuntabilitas dan keterbukaan. Dengan demikian, pemahaman tentang pemerintahan sangat diperlukan bagi suatu negara. Setiap pemerintahan harus memiliki

kapasitas untuk melayani dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang diambil. Pemerintah telah berhasil jika tujuannya tercapai sesuai yang diinginkan. Tujuannya adalah mencapainya dengan sumber daya keuangan yang cukup. Evolusi akuntansi sektor publik untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat dinilai melalui laporan keuangan pemerintah nasional dan lokal. Selanjutnya, berbagai pihak menggunakan laporan ini sebagai informasi untuk membuat keputusan (Mustika & Fadilah, 2020).

Adapun jurusan akuntansi kini berkembang cukup pesat adalah akuntansi pemerintahan. Keharusan penggunaan akuntansi untuk mendokumentasikan dan melaporkan kinerja pemerintah bermula dari tuntutan keterbukaan dan pertanggungjawaban publik terhadap uang publik yang dikelola oleh pemerintah. Demokrasi, kepercayaan, dan pemerintahan yang baik semuanya bergantung pada akuntabilitas (pemerintahan

yang baik). Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit organisasi dalam pemerintah nasional atau daerah semuanya termasuk dalam lingkup pemerintah yang digunakan dalam akuntansi pemerintah. Menurut aturan yang relevan, unit-unit organisasi ini diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. Karena SAP adalah satu-satunya standar untuk melakukan akuntansi pemerintah, PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP harus diikuti untuk mengatur Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Ini memerlukan upaya untuk mengharmonisasikan berbagai ketentuan baik di pemerintah pusat atau daerah (Hartono & Husain, 2021).

PP No. 8 Tahun 2006 mengharuskan laporan keuangan menunjukkan bagaimana keuangan negara atau daerah dikelola dalam waktu tertentu. Relevansi, ketergantungan, kemampuan evaluasi atau perbandingan, dan keterpahaman semuanya diperlukan untuk memperoleh data keuangan berkualitas tinggi dan dianggap sebagai kriteria pelaporan keuangan yang memadai (Febriansyah, 2023). Setiap daerah membuat pedoman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui struktur data yang efektif, perluasan peran, pemberdayaan kelompok, dan metode penyampaian layanan. Sektor otoritas telah mengalami perubahan signifikan dari waktu ke waktu karena kemajuan zaman dan teknologi modern. Kepercayaan pada pemerintahan yang baik dan demokratis (*Good Governance* dan Demokratis) merupakan salah satu perubahannya. Aparatur yang berwenang dapat berupaya memberikan layanan yang bertanggung jawab dan transparan sebagai akibat dari meningkatnya kesadaran publik terhadap tuntutan jaringan (Loka & Handayani, 2020).

Tujuan dari Sistem Informasi Akuntansi (SIA) ialah untuk mengefisienkan dan menyelaraskan pemberitahuan keuangan daerah dengan sistem pusat. Untuk mencapai

tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*), pemerintah berupaya meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengendalian keuangan daerah (Ayem, 2023). Kemajuan IT telah menjadi penting bagi semua lapisan untuk mencapai tujuan mereka, tidak hanya bagi perusahaan atau institusi (Anggadini & Puspitawati, 2021). Kemajuan teknologi dapat memudahkan lembaga dan organisasi untuk beroperasi lebih baik secara keseluruhan dan melaksanakan berbagai tugas dengan lebih cepat, akurat, dan tepat, yang akan meningkatkan produktivitas (Dewi et al., 2020).

Tingkat kesesuaian pelaporan pada pengolahan keuangan daerah pada setiap periode anggaran dinilai dari kualitas LKPD. BPK yang melakukan telaah dan evaluasi LKPD memberikan opini yang menunjukkan kualitas LKPD. BPK melakukan audit berkala terhadap LKPD untuk memberikan penilaian terhadap tingkat kenetralan data yang tercantum dalam laporan. Opini BPK yang mewakili hasil audit adalah Memenuhi Syarat, Tidak Memenuhi Syarat, dan Tanpa Pendapat (Widiatmoko, 2020).

Karena laporan keuangan daerah merupakan komponen tata kelola pemerintahan yang efektif, maka kualitasnya sangat penting bagi semua pemerintah. Laporan keuangan berkualitas tinggi dapat membantu proses pengambilan keputusan pemerintah di masa depan. Laporan keuangan yang mendukung keputusan akan mempercepat pembangunan dan mengurangi kemiskinan. Sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2006 mengenai pelaporan keuangan dan kinerja lembaga pemerintah serta PP No. 29 Tahun 2014 tentang sistem pertanggungjawaban lembaga pemerintah, laporan keuangan berfungsi sebagai alat untuk pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan negara atau daerah dalam waktu tertentu. Pelaporan keuangan yang baik menunjukkan bahwa sebuah

pemerintah mengelola organisasi-organisasinya dalam batas-batas yurisdiksinya.

Sistem akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang dipakai agar meminfokan pihak-pihak terkait tentang tindakan organisasi atau informasi keuangan. Kapasitas data keuangan dipakai sebagai olah data yang menyatukan perusahaan dengan pihak-pihak yang terhubung langsung menunjukkan keadaan bisnis (Puspita et al., 2021). Kondisi suatu perusahaan tercermin dalam sejumlah titik data yang disertakan dalam laporan keuangan. Data dan perusahaan merupakan representasi dari penyajian keuangan organisasi. Lebih jauh, arahan dalam laporan keuangan pemerintah harus mampu menjawab berbagai masalah yang dihadapi pengguna laporan. Jika arahan dalam laporan keuangan dapat memengaruhi pilihan pemakai dengan menolong prediksi kejadian masa lalu atau saat ini, meramalkan masa depan, dan memperkirakan atau mengoreksi hasil prakiraan sebelumnya, maka laporan tersebut dapat dianggap relevan (Apriani, 2021).

Menurut Nunuy Nurafiah, Ketua Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), kualitas laporan keuangan yang didapatkan pemerintah Indonesia masih buruk (Kompas, 2020). Khususnya di tingkat pemerintah daerah, hal ini dapat dimanfaatkan sebagai celah untuk praktik curang atau korupsi. Nunuy mengatakan IAI telah menetapkan lima tingkatan standar kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Namun menurut temuan, belum ada pemerintah daerah yang mencapai level 5. Mayoritas laporan keuangan utama pemerintah daerah masih berada pada level 2-3. Pelaporan keuangan pemerintah daerah masih tampaknya berkualitas rendah. Standar tinggi dalam pelaporan keuangan dapat membantu mencegah praktik korupsi oleh orang-orang yang ceroboh. Hal ini agar publik dapat melihat akuntansi pemerintah dalam

pengelolaan keuangan melalui laporan keuangan. Publik berharap pemerintah menangani dana publik dengan cara yang terbuka dan jujur. Maka dari itu, peran BPK adalah menjamin pelaporan keuangan pemerintah bersifat transparan. Auditor juga harus senantiasa memantau dan mengawasi prosedur pelaporan keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan akan memenuhi harapan publik dan berkualitas tinggi. Untuk mencapai pelaporan yang baik, akuntan juga harus melakukan penelitian secara berkala dengan tujuan untuk memengaruhi kebijakan publik. Temuan penelitian dapat menjadi dasar bagi keputusan kebijakan (Nita, 2023).

Berdasarkan definisi yang diberikan di atas, LKPD masih berkualitas rendah dan sering kali dijadikan sebagai pembenaran untuk perilaku tidak etis atau korupsi. Karena masih ada banyak inkonsistensi dan banyak LKPD yang gagal menyerahkan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat kini mengharapkan tata kelola yang baik dalam melaksanakan akuntabilitas publik sebagai bentuk tanggung jawab yang diwakili dalam laporan keuangan berkala. Untuk membuat prosedur pelaporan dan pencatatan keuangan daerah mereka lebih akurat dan memberikan pencerahan, pemerintah daerah harus memperbaharunya (Animah, 2020).

SAKD ialah beberapa unsur yang dapat mempengaruhi mutu LKPD. Dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan APBD secara manual maupun otomatis, SAKD merupakan tahapan pengumpulan data, pendokumentasian, peringkasan, dan pelaporan keuangan (Saputra dkk., 2023). SAKD dapat mempengaruhi penyusunan laporan keuangan terstruktur, termasuk klasifikasi, pencatatan, dan pelaporannya. Dengan SAKD yang bermutu tinggi, mutu laporan keuangan dapat dimaksimalkan. Unsur lainnya adalah komitmen organisasi atau keinginan orang untuk tetap berada dalam suatu organisasi agar tujuannya

tercapai.

Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buleleng adalah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Sistem aplikasi akuntansi berbasis web yang dikembangkan oleh Badan Pengelola Informasi Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Dinas Kominfosanti telah diterapkan di OPD-OPD di kabupaten tersebut. Sistem aplikasi SIPD digunakan oleh seluruh OPD, termasuk Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, baik untuk penginputan maupun pembuatan pelaporan keuangan. BPK telah memberikan opini WTP kepada Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2023, LKPD Kabupaten Buleleng telah diaudit oleh BPK Perwakilan Bali dengan kategori entri I dan entri II. Selama audit, Buleleng memperoleh WTP (Pendapat Tanpa Pengecualian) dari BPK. Namun, pendapat kuat BPK tentang laporan keuangan tidak berarti bahwa laporan tersebut bebas dari kesalahan. Dokumentasi dan pelaporan aset yang tidak jelas, penerimaan retribusi daerah, pendapatan sewa yang tidak teratur, pendapatan daerah, pengelolaan aset tetap, dan realisasi pengeluaran adalah beberapa masalah yang diidentifikasi oleh perwakilan BPK Bali. Dinas Sosial, sebuah badan pemerintahan daerah yang mengelola sejumlah besar anggaran daerah, mendapat penekanan khusus. Berdasarkan deskripsi tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Kualitas Laporan Keuangan (KLK) yang dihasilkan oleh pemerintahan daerah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh penggunaan SIA. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengguna SIA mempengaruhi KLK daerah, khususnya di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

METODE PENELITIAN

Metode yaitu suatu pendekatan yang bisa digunakan untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Zulkarnaen dkk. (2020:229), Prosedur penelitian adalah metodologi kerja yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan mengidentifikasi fenomena yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif.

Menurut (Sugiyono, 2020), teknik penelitian kuantitatif merupakan pendekatan positif yang dilakukan dengan melakukan analisis populasi, akumulasi data dengan menggunakan berbagai alat penelitian, dan analisis data statistik untuk pengujian hipotesis. Data kuantitatif bersumber dari data asli yang dikumpulkan oleh staf Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Populasi adalah domain untuk generalisasi yang terdiri dari subjek objek dengan fitur dan karakteristik yang dipilih oleh peneliti untuk analisis dan penilaian (Sugiono, 2020). Staf di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah salah satu peserta dalam populasi penelitian.

Sebuah skala ordinal, yang dapat dinilai dari yang terendah hingga tertinggi atau sebaliknya, digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini. Variabel-variabel diukur menggunakan skala Likert, yang menilai tingkat setuju atau tidak setuju. Sangat Tidak Setuju (SD), Tidak Setuju (D), Netral (N), Setuju (A), dan Sangat Setuju (SA) adalah angka-angka pada skala ordinal peneliti, yang berkisar dari 1 hingga 5.

Data responden

Tabel 1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki (L)	20	57,1%
Perempuan (P)	12	42,9%
Total	32	100%

Sumber : Olah Data SPSS, 2025.

Jenis kelamin responden dapat disimpulkan dari data pada tabel sebelumnya. Terdapat 20 laki-laki, atau 57,1% dari total responden, dan

15 perempuan, atau 42,9%. Data di atas menunjukkan bahwa laki-laki merupakan mayoritas partisipan penelitian.

Tabel 2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase (%)
<20 Tahun	1	5,7 %
21-30 Tahun	14	42,9%
31-40 Tahun	10	28,6 %
41-50 Tahun	6	17,1%
>50 Tahun	1	5,7 %
Total	32	100%

Sumber : Olah Data SPSS, 2025.

Menurut tabel di atas, jika usia responden diperhitungkan, dua orang atau 5,7% responden penelitian berusia di bawah 20 tahun, lima belas orang atau 42,9% berusia antara 21 dan 30 tahun, sepuluh orang atau 28,6% berusia antara 31 dan 40 tahun, dan enam orang atau 17,1% berusia antara 41 dan 50 tahun. Dan hingga 2 orang atau 5,7% berusia >50 tahun. Dari statistik di atas, terlihat bahwa mayoritas partisipan penelitian berusia antara 21 dan 30 tahun.

Tabel 3. Deskripsi Responden Berdasarkan Status Pegawai

Status Pegawai	Jumlah	Persentase (%)
ASN	11	34,3%
NON ASN	21	65,7%
Total	32	100%

Sumber : Olah Data SPSS, 2025.

Status pekerja yang terpilih sebagai responden dapat dilihat pada tabel di atas. Sebanyak 12 orang atau 34,3% berstatus pegawai ASN, sedangkan 23 orang atau 65,7% tidak berstatus pegawai ASN. Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas partisipan penelitian adalah pegawai dengan status non-ASN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengaplikasikan dua variabel sebagai berikut, kualitas laporan keuangan

sebagai variabel dependen (Y) dan penerapan SIA sebagai variabel independen (X). Perangkat lunak SPSS digunakan untuk mendeskripsikan data penelitian.

Tabel 1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		25
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.76256691
Most Extreme Differences	Absolute	.125
	Positive	.125
	Negative	-.125
Test Statistic		.125
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Olah Data SPSS, 2025.

Pertama, dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov pada tingkat signifikansi 5%, normalitas distribusi data untuk variabel independen dan dependen telah diselidiki (Sari & Alzaber, 2020). Hasil analisis pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi, atau Asymp. 2-tailed, adalah $0.200 > 0.05$. Oleh karena itu, data dapat dianggap terdistribusi normal jika nilai signifikan Asymp. (2-tailed) lebih tinggi dari nilai signifikansi 0.05, yang membentuk dasar untuk proses pengambilan keputusan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Karena itu, analisis regresi linier dasar telah memenuhi asumsi atau kondisi normalitas. Uji kedua, yaitu uji linearitas, perlu dilakukan setelah yang pertama. Mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan linear yang substansial atau tidak adalah tujuan utama dari uji linearitas. Ketika variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) memiliki hubungan linear, terdapat korelasi yang kuat (Laka et al., 2020). Pembuatan keputusan dalam Uji Linearitas melibatkan perbandingan nilai

Deviasi Linear (Sig.) dengan 0,05. Hubungan linear yang substansial antara variabel independen dan dependen ditunjukkan dengan nilai Sig. Deviasi Linear yang lebih besar dari 0,05. Menurut Laka et al. (2020), jika nilai Sig. Deviasi Linear lebih kecil dari 0,05, tidak ada hubungan linear yang signifikan secara statistik antara variabel independen dan dependen. Tabel 2 menampilkan hasil uji linearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Linieritas

			Su m of Squa res	D f	Me an Squa re	F	S ig.
* X	Bet ween Grou ps	(Com bined)	28 7.71 0	1 0	28. 771	3. 687	. 01 3
		Linea rity	21 3.79 7	1	21 3.79 7	27 .397	. 00 0
		Devia tion from Linearit y	73. 913	9	8.2 13	1. 052	. 44 9
	Within Groups		10 9.25 0	1 4	7.8 04		
	Total		39 6.96 0	2 4			

Sumber : Olah Data SPSS, 2025.

Menurut nilai signifikan (Sig) dari deviasi dari linearitas di tabel 2 di atas, diperoleh nilai 0,449, yang menunjukkan bahwa deviasi dari linearitas >0,05. Variabel Aplikasi SIA (X) dan variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) memiliki hubungan linier yang substansial, menurut temuan ini.

Setelah uji normalitas dan linearitas selesai, uji heteroskedastisitas dilakukan. Pengujian untuk heteroskedastisitas bertujuan untuk mengidentifikasi adanya perbedaan dalam varians (variabilitas) nilai residual di

seluruh pengamatan dalam model regresi. Heteroskedastisitas adalah kondisi di mana varians nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya berubah, sedangkan homoskedastisitas adalah kondisi di mana variansnya konstan. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas. Untuk mengetahui apakah model regresi menunjukkan gejala heteroskedastisitas, lakukan uji Glejser. Uji heteroskedastisitas Glejser didasarkan pada prinsip dasar regresi variabel independen terhadap nilai residual absolut (Indri & Putra, 2022).

Temuan dari uji Glejser untuk heteroskedastisitas menunjukkan bahwa jika nilai signifikansi (Sig.) >0,05, model regresi tidak menunjukkan heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi (Sig.) <0,05, dapat dikatakan bahwa model regresi menunjukkan heteroskedastisitas (Indri & Putra, 2022). Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan dalam Tabel 3.

Tabel 5. Coefficients^a

Model	Unstan dardized Coefficie nts		Standardized Coefficients	t	S ig.
	B	St d. Erro r			
(Con stant)	-.354	2.260		-.157	.877
X	.113	.133	.257	.849	.405
Y	.005	.104	.013	.043	.966

a. Dependent Variable: Abs RES

Sumber : Olah Data SPSS, 2025.

Nilai signifikan (Sig) untuk variabel Uji regresi linier dasar dapat dilakukan jika

semua kondisi terpenuhi (Indri & Putra, 2022; Laka et al., 2020). $Y = a + bx$ merupakan rumus umum regresi linier dasar. Sementara itu, Anda dapat merujuk pada hasil pada tabel 4 di bawah ini untuk menentukan nilai koefisien regresi.

Tabel 5. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.734 ^a	.539	.519	2.822
a. Predictors: (Constant), X				

Tabel 6. Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t.	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.885	4.122		2.156	.042
	SIA	.936	.181	.734	5.181	.000
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan keuangan						

Sumber : Olah Data SPSS, 2025.

Angka konstanta dari koefisien yang tidak distandarisasi adalah nilai konstanta. Nilai dalam hal ini adalah 8,885. Angka ini adalah konstanta, yang berarti bahwa nilai konsisten dari kualitas pelaporan keuangan (Y) dalam ketidakhadiran penerapan SIA (X) adalah 8,885. Selain itu, koefisien regresi dilambangkan oleh koefisien 'b'. Nilainya adalah 0,936. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat kenaikan 0,936 dalam kualitas pelaporan keuangan (Y) untuk setiap peningkatan 1% dalam penerapan SIA (X). $Y = 8,885 + 0,936 X$ adalah persamaan regresi sebagai hasil.

Selanjutnya, dengan menggunakan nilai sig. yang diperoleh, pengujian hipotesis dilakukan (H_a = Adopsi SIA mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan). Untuk memutuskan apakah akan menerima hipotesis tersebut, nilai sig. harus $<0,05$. Dari hasil pada Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa terdapat penerapan SIA pada kualitas pelaporan keuangan karena nilai sig. adalah 0,000, yang secara signifikan $>0,05$.

Dalam analisis regresi linier sederhana, nilai R^2 di tabel 5 dapat digunakan untuk menghitung sejauh mana SIA mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.

Sumber :Olah Data SPSS, 2025.

Output pada tabel 5 di atas menunjukkan bahwa nilai R Square adalah 0,734. Angka ini menunjukkan bahwa implementasi SIA (X) memiliki dampak sebesar 73,4% terhadap KKK (Y), tetapi variabel lain yang tidak diteliti memiliki dampak sebesar 26,7% terhadap KKK.

Menurut pengujian hipotesis, kredibilitas pelaporan keuangan dipengaruhi secara positif dan signifikan secara statistik oleh penggunaan SIA. Ini menunjukkan bahwa perusahaan IT dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Hal ini konsisten dengan studi (Gusherinsya & Samukri, 2020) yang menunjukkan hubungan antara kualitas pelaporan keuangan dan pengaruh SIA. Lebih lanjut, menurut penelitian oleh Wiranti (2021), laporan keuangan akan lebih dapat diandalkan, relevan, dapat dipahami, dan komparatif jika SIA dijalankan dengan efisien. Menurut temuan penelitian tersebut, LKPD dipengaruhi oleh SAKD. Penelitian oleh Mustika dan Fadilah (2020) menemukan bahwa SAKD tidak berpengaruh pada kualitas LKPD, yang bertentangan dengan temuan penelitian ini.

SAKD berkaitan dengan pelaporan

keuangan sebagai alat manajemen, pengawasan, dan akuntabilitas. Minimnya temuan BPK terhadap laporan keuangan dinas sosial, yang mana pengelolaan anggarannya dipecah menjadi beberapa subkegiatan yang berkaitan langsung dengan bantuan masyarakat, terlihat yakni sistem akuntansi keuangan daerah yang berlaku di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sudah cukup baik dan mempengaruhi mutu laporan keuangan daerah. Aset daerah masih terdokumentasi dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa temuan terkait pencatatannya, yang sebagian besar dalam kondisi yang tidak sesuai. Setiap tahun, hal ini mengakibatkan ketidakakuratan kecil dalam perhitungan neraca penyusutan aset.

Hasil tes menunjukkan bahwa KKK daerah sangat dipengaruhi oleh SIA daerah. Ini juga berlaku untuk Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, di mana LKPD memiliki peran besar dalam bagaimana dinas sosial menjalankan protokol SAKD. Ini menjamin relevansi, komparabilitas, dan keterandalan laporan keuangan daerah yang dapat dipahami oleh BPK sebagai lembaga pengawas.

Persentase signifikan dari komentar responden tentang variabel SAKD menunjukkan bahwa, sesuai dengan hasil uji, Dinas Sosial telah menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah yang terstruktur untuk tujuan pembuatan laporan keuangan. Namun, hasil studi menunjukkan bahwa SAKD memiliki sedikit pengaruh terhadap KKK. Tampaknya, meskipun laporan keuangan saat ini disusun dengan baik, mereka belum dapat berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan. Selain itu, menurut jawaban jajak pendapat, beberapa catatan belum dibuat secara kronologis, yang mungkin juga mempengaruhi kualitas LKPD karena penyelesaian semua formulir yang akurat dapat meningkatkan KKK.

Hasil dari penelitian dan uraian pembahasan, SAKD memiliki dampak yang menguntungkan dan signifikan terhadap keunggulan KKK daerah, khususnya di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Koefisien positif menunjukkan bahwa penggunaan SAKD berkorelasi positif dengan KKK pemerintah daerah. Dengan 73,4% dari SAKD mempengaruhi KKK di Dinas Sosial Buleleng, hasil uji koefisien menunjukkan bahwa SAKD berpengaruh pada laporan keuangan daerah. Namun, manajemen sumber daya manusia SAKD masih perlu diperhatikan karena akan berdampak pada tingkat pertanggungjawaban laporan keuangan instansi. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman umum kepada lembaga tentang signifikansi SAKD dan perannya dalam mencapai kualitas laporan keuangan, serta potensinya untuk mempengaruhi hasil penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Ini adalah manfaat praktis dari kesimpulan dan diskusi di atas. Sebuah sistem akuntansi keuangan yang terintegrasi harus diterapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan ketepatan dan efektivitas penyusunan laporan keuangan. Selain itu, harus secara teratur melatih staf akuntansinya untuk memastikan bahwa sistem akuntansi digunakan secara efektif sehingga laporan keuangan berkualitas tinggi dapat dihasilkan, dan harus melakukan audit internal serta evaluasi untuk menjamin kualitas laporan keuangan. Rekomendasi ini merupakan hasil temuan peneliti. Kekurangan dari penelitian ini adalah hanya melihat satu variabel independen, yaitu variabel SAKD. Faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian mengenai dampak SAKD terhadap mutu data keuangan perlu dikaji lebih mendalam. Disarankan kepada seluruh pihak dan unit kerja untuk menyusun staf berdasarkan latar belakang dan keterampilannya guna meningkatkan mutu laporan keuangan, khususnya di bidang keuangan.

SIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Febriansyah. (2023).Sistem Informasi Akuntansi pada Kualitas Laporan Keuangan UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(1). <https://doi.org/10.34010/jra.v15i1>
- [2] Anggadini & Puspitawati. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Rekayasa Sains
- [3] Budiman, S. & Nadia, D. J. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Bpkad Kabupaten Bogor). *Jurnal Akuntansi*, 3(1). <http://dx.doi.org/10.56444/psgj/v3i01.2792>
- [4] Animah, dkk. (2020).Pengaruh Kompetensi SDM Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(1), 99–109. <https://doi.org/10.29303/jaa.v5i1.93>
- [5] Apriani, H. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Sumut. *Skripsi. Universitas Medan Area*
- [6] Ayem & Amahala. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Informasi Akuntansi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 12(1), 90-102
- [7] Gusherinsya & Samukri. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 58–68
- [8] Hartono & Husain. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* ,Bandung: CV Media Sains Indonesia
- [9] Indrayani & Widiastuti. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi SDM Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4, 1–16.
- [10] Mustika & Fadilah. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 6(2), 2469–6561.
- [11] Nita, N. K. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa Sekecamatan Tampaksiring. *Hita Akuntansi dan Keuangan*. 4(2), 98-106.
- [12] *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- [13] *Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- [14] *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Pasal 1 Tahun 2005 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- [15] *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*
- [16] Puspita, dkk., (2021).Sistem Akuntansi Pemerintah pada sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, Jakarta: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jendral Perbendaharaan, Kementrian keuangan
- [17] Saputra, dkk. (2023). Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi,Pengendalian Eksternal dan Sistem Akuntansi Kas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor

Notaris/PPAT Kabupaten Ponorogo.
Sentri: *Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 940–947.

- [18] Sugiyono. (2020). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung:ALFABETA.
- [19] Widiatmoko, A.H. (2020).Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi, Kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Daerah.
- [20] Zulkarnaen, dkk. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243.